GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : **Kompas**	**Tgl/Bln/Thn** : **08 November 2007**
Subyek : **Kehutanan**	**Hari** : **Kamis**
	Halaman : **13**

REDD Mengoreksi
Indonesia Hadapi Masalah Akurasi

Jakarta, Kompas - Implementasi skema penurunan emisi melalui pencegahan deforestasi dan degradasi hutan (reducing emissions from deforestation and degradation/REDD) selain bisa mendatangkan insentif bagi pemberdayaan masyarakat miskin di sekitar hutan, juga dapat mengoreksi tata ruang kehutanan.

"Dalam konteks pemekaran wilayah pemerintah daerah sekarang, sering tata ruang kehutanan dilanggar tanpa ada perencanaan. Di dalam penerapan REDD, tata ruang kehutanan yang disertai perencanaan disyaratkan harus ada untuk penentuan evaluasi pemberian insentif dari negara-negara maju," kata Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan pada Departemen Kehutanan Nur Masripatin, Rabu (7/11).

Menurut dia, pada Konferensi Para Pihak Ke-13 (COP-13) dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) di Bali, 3-14 Desember 2007, diharapkan disepakati mekanisme pendanaan skema REDD. Insentif diberikan negara-negara maju bagi negara berkembang yang mampu mencegah deforestasi dan degradasi hutan, tetapi itu bersifat sukarela yang bergantung pada kesiapan tata ruang dan perencanaan soal kehutanan. Indonesia termasuk belum beres dalam penataan itu.

"Data peruntukan kawasan hutan dari pemerintah daerah sering bermasalah akurasinya. Padahal, remote sensing (pengindraan jauh) kini dapat dilakukan setiap negara," kata Nur.

Dari data statistik tahun 2005, hutan daratan 123.459.513,98 hektar, luas hutan di perairan mencapai 3.517.063,7 hektar. Luas keseluruhan termasuk suaka alam dan pelestarian alam 23.597.991,57 hektar, hutan lindung 31.782.576,02 hektar, hutan produksi terbatas 21.717.309,26 hektar, hutan produksi tetap 35.813.616,43 hektar, hutan produksi yang dapat dikonversi 14.057.816 hektar, dan hutan fungsi khusus 7.268 hektar.

Perairan diamankan

Sementara itu, untuk pengamanan COP-13, pihak Polri menyiagakan dua dari empat kapal pengamanan di perairan sekitar Nusa Dua sejak Senin lalu.

Kepala Polda Bali Irjen Paulus Purwoko kemarin memeriksa persiapan pengamanan laut di sekitar Nusa Dua dengan menumpang KP Bala Dewa yang dikomandani Komisaris Subiyanto. Menurut Purwoko akan ada bantuan dua kapal dari Jakarta.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Pemeriksaan kapal nelayan, kata Purwoko, akan diperketat guna mengamankan kawasan dari penyusupan barang berbahaya, terutama bahan peledak.

Keempat kapal itu siap untuk operasi SAR, patroli, dan mendukung kegiatan evakuasi bila terjadi hal-hal tak diharapkan, juga disiapkan dua heli NBO 105. Polda Bali mengerahkan 3.000 personel ke 14 titik pengamanan. Mereka juga dibantu personel dari Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Polda Bali masih membutuhkan tambahan delapan anjing pendeteksi bahan peledak untuk ditempatkan di sejumlah pintu masuk Bali.

Sementara itu, jajaran Kepolisian Resor Banyuwangi, Jawa Timur, memperketat pengawasan para penumpang yang akan menyeberang ke Bali melalui Pelabuhan Ketapang. Kepala Polres Banyuwangi Ajun Komisaris Besar Ery Nursatari menjelaskan, setiap orang yang akan menyeberang harus menunjukkan kartu identitas, KTP atau SIM.

"Ini konferensi tingkat internasional sehingga perlu pengamanan ketat kepada warga yang ke Bali," kata Ery. (NAW/ANS/ULE)

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP